DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jln. Gunung Tembak RT 6, Kel. Kampung Enam, 77123
Telepon 0551-3806403

RENCANA KERJA

RENJA 2022

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program prioritas, serta gambaran permasalahan di sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sejalan dengan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, beberapa perubahan yang dilakukan diantaranya; memperbaharui permasalahan pembangunan daerah di sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan; menyesuaikan sasaran, indikator sasaran, dan target pada tiap sasaran RPJMD; serta menyesuaikan numenklatur Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi, program, kegiatan, serta sub kegiatan.

Ucapan terima kasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra ini. Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini belum lengkap menggambarkan dokumen perencanaan yang ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra di masa datang.

Tarakan, Desember 2021
Kepala Dinas,

H. Budiono, S.H., M. Hum.
NIP 196212251993031004

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
PRAKATA ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra 2021 5
2.2 Analisis kinerja Pelayanan DPTK Kota Tarakan 5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPTK
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPTK 24
3.3 Program dan Kegiatan 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 30

BAB V PENUTUP 34

BAB

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Tarakan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk perencanaan jangka menengah (lima tahun) dan Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan jangka pendek (satu tahun).

Penyusunan dokumen Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Kota Tarakan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup DPTK, serta melalui proses dan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPTK Tahun 2022 telah melalui rangkaian tahapan, yaitu:

a. persiapan penyusunan Renja;
b. penyajian rancangan awal Renja;
c. pembahasan internal OPD rancangan Renja;
d. penyusunan rancangan akhir Renja; dan
e. penetapan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2022, memerhatikan dan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 66);
14. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fugsi serta Tata Kerja Organsasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPTK Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPTK Tahun 2022 adalah:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DPTK Kota Tarakan Tahun 2022.

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan serta subkegiatan tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK Kota Tarakan secara sistematis.
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian atau unit, dan
d. Sebagai pedoman dalam penentuan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I	**Pendahuluan** Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
Bab II	**Gambaran Pelayanan** Berisi evaluasi pelaksanaan Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2021 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 serta penelaahan usulan program, kegiatan, serta subkegiatan.
Bab III	**Permasalahan dan Isu-isu Strategis** Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022.
Bab IV	**Tujuan dan Sasaran** Menguraikan rencana program dan kegiataan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
Bab V	**Penutup** Berisi catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPTK TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPTK Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Kajian (review) dilakukan terhadap pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2021. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPTK Tahun 2021 dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPTK Kota Tarakan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pada tahun 2020 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perbandingan perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran. Kedua capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, serta Tabel 2.4.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPTK Tahun 2021 dan Pencapaian Sasaran dan Tujuan Strategis DPTK s.d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kbupaten Kota	Persentase layanan penunjang perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	1 dokumen							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 layanan						2 layanan	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	714 Orang Bulan						714 Orang Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	144 Orang Bulan						144 Orang Bulan	

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 layanan						2 layanan	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai							1 unit	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan							0	
		Jumlah pakaian batik yang diadakan							3 orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi	1 orang						0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	1 orang						0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	4 layanan						4 layanan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	10 Jenis						5 Jenis	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	1 Jenis							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	110 jenis						85 jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	3 jenis						3 jenis	

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	20 koordinasi						20 koordinasi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	37 aset							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit							
	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	1 set							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 jenis							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 jenis							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	200 lbr							60 lbr
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 bulan							12 bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan waktu layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan							12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa umum perkantoran	6 kegiatan							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	41 aset							
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	16 Unit						16 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	2 Unit, 360 Liter						2 unit, 24 liter	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	2 unit						2 unit	
		Jumlah kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	2 unit						2 unit	
		Jumlah BBM kendaraan operasional	720 liter						24 liter	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan lainnya yang dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	5 jenis							

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun**	**100%**							
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**1 dokumen**							
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen							
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 dokumen							
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang kompeten**	**94%**							
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**800 pencari kerja**							
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	1 Paket							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah kegiatan penyediaan sarpras dan instruktur kerja yang dilakukan untuk kemitraan dengan swasta	2 kegiatan							
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	jumlah jenis penyediaan sarpras	10 unit							
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja yang terserap**	**22.35%**							
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	cakupan tersedianya pelayanan antar kerja	3 kegiatan							
	Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	7 BKK							
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	200 orang							
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	jumlah layanan disabilitasi ketenagakerjaan	1 kegiatan							
	Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah wirausaha baru yang terbentuk	60 wirausaha							
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	1200 pencari kerja							
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan job fair/bursa kerja yang terselenggara	2 kegiatan							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan**	**50%**							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja**	**15 perusahaan**							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan	5 SK							
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan	300 dokumen							
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40 Perusahaan							
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	6 kasus							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	6 kegiatan							
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah perjanjian bersama yang disepakati	1 Perjanjian Bersama							
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah keanggotan Serikat Pekerja yang diverifikasi	20 SP/PB							
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan	6 kegiatan							
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah sosialisasi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2 kegiatan							

BIDANG PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Pangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	PROGRAM PERENCNAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Peningkatan Daya Saing IKM yang Difasilitasi**	**11,11%**							
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**jumlah kegiatan pembangunan industri**	**5 kegiatan**							
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Industri Kota Tarakan	2 dokumen							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 kegiatan							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/ dikembangkan	2 unit							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	25 IKM							
		Jumlah masyarakat yang difasilitasi	100 orang							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen							
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90%							
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	414 izin							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah izin usaha industri yang terbit	460 izin							

bersambung ...

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	20 kegiatan							
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	40.01%							
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	323 usaha industri							
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data dan informasi industri yang dikumpulkan diolah dan dianalisis	5 dokumen							
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah informasi industri yang terpublikasi	1 buku							
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IUI yang menyampaiakan data ke SIINas	248 usaha industri							

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peridustrian dan Tenaga Kerja KotaTarakan

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target					Realisasi					Rasio				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kesempatan Kerja			0	59,07%				0	13,01%				0	22,03%			
2	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama			56%	33,33%				75%	69,23%				134%	207,71%			
3	Persentase pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah			4,2%	5,36%				71,83%	32,45%				1.710%	6,05%			
4	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasiltasi			9,50%	17,1%				6,33%	4,70%				66,63	27,09%			
5	Persentase peningkatan pelaku IKM pada klaster industri			0%	4,6%				0%	11%				0%	239,13%			

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peridustrian dan Tenaga Kerja KotaTarakan

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
Penyediaan jasa surat menyurat			-	-	-			-	-	-					
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	294.150.702,00	210.000.000,00	-	-	-	125.622.215,00	103.492.289,00	-	-	-	42,71	49,28			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000.000,00	5.493.765,00	-	-	-	4.501.200,00	3.350.000,00	-	-	-	50,01	60,98			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	95.679.000,00	78.156.000,00	-	-	-	77.309.000,00	62.646.000,00	-	-	-	80,80	80,16			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.530.000,00	0,00	-	-	-	14.811.000,00	0,00	-	-	-	79,93	-			
Penyediaan alat tulis kantor	52.986.309,00	40.381.125,00	-	-	-	52.986.309,00	29.639.400,00	-	-	-	100	73,40			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.778.452,00	8.330.716,00	-	-	-	11.219.000,00	7.345.770,00	-	-	-	95,25	88,18			
Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah	18.873.078,00	0,00	-	-	-	18.873.078,00	0,00	-	-	-	100	-			
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	16.800.000,00				0,00	15.300.000,00				-	91.07			

bersambung ...

bersambung ....

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA															
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.920.700,00	10.000.000,00				8.796.800,00	9.907.500,00				63,19	99,08			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keteram-pilan Bagi Pencari Kerja	193.500.000,00	111.210.000,00				191.345.000,00	111.100.000,00				98,89	99,20			
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana LLK	0,00	140.000.000,00				0,00	138.766.416,00				-	99,12			
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIKECIL DAN MENENGAH															
Fasilitas Sertifikasi dan Haki Produk Industri	46.144.370,00	91.612.246,00				38.212.970,00	86.420.236,00				82,81	94,33			
Operasional UKM Center dan Rumah Kemasan	219.940.000,00	0,00				0,00	0,00				0,00	-			
Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM	93.720.000,00	50.000.000,00				0,00	43.130.000,00				0,00	86,26			
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA															
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	5.160.000,00	0,00				3.026.650,00	0,00				58,66	-			
Penyebarluasan informasi bursa TK	25.090.000,00	0,00				15.167.000,00	0,00				60,45	-			

bersambung ....

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengemb. kelembagaan produktivitas dan pelthan kewirausahaan	71.785.000,00	0,00				68.185.000,00	0,00				94,99	-			
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	0,00	10.270.000,00				0,00	10.270.000,00				-	100			
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kerja	0,00	11.650.000,00				0,00	9.670.000,00				-	83,00			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN															
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan HI	41.281.000,00	0,00				30.825.000,00	0,00				74,67	-			
Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	0,00	17.980.000,00				0,00	17.980.000,00				-	100			
Konsolidasi Pelaksanaan Pengktan Intensitas Pencegahan dan Penyele-saian Perselisihan HI	0,00	4.300.000,00				0,00	560.000,00				-	13,02			
Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama HI serta Penerapan Pengupahan	0,00	19.500.000,00				0,00	16.460.000,00				-	84,81			
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI															
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	10.083.541.000	0,00				9.835.008.036,00	0,00				97,54	-			
Rata-Rata											**78,66**	**81,39**			

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja, Anggaran, dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Peridustrian dan Tenaga Kerja KotaTarakan
Hingga Triwulan III Tahun 2021

No.	Sasaran	Indkator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Triwulan III	Persen-tase	Program	Anggaran		Persen-tase
								Pagu	Realisasi (TW III)	
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat kesempatan kerja	Persen	21,62%	21,62%	0	Program Penempatan Tenaga Kerja	25.000.000	13,01%	0
2	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus HI yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	PB	50%	66,67%	133,34	Program Hubungan Industri	37.479.637	18.535.000	49,45
3	Meningkatnya pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	Persen	6,21%	38,50%	619,97	-	0	32,45%	0
4	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasiltasi	Persen	29,00%	16%	206,90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	24.956.317	4,70%	0

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2019, indikator kinerja ketiga yakni Persentase pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah rasio capaiannya bahkan mencapai 17 kali lipat. Salah satu faktor pendorong tingginya pencapaian tersebut adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS). Kemudahan dalam pengurusan izin berusaha melalui OSS tersebut mendorong pelaku IKM untuk mendaftar usahanya serta juga mendorong tumbuhnya usaha industri baru. Hasil evaluasi tersebut juga memperlihatkan bahwa, selama dua tahun terakhir kinerja pelayanan DPTK sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan capaian indikator kinerja secara umum melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari sisi penyerapan anggaran, sesuai hasil analisis (Tabel 2.3) menunjukkan bahwa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau realisasi sama dengan nol. Sebagai contoh, kegiatan Operasional UKM Center dan Rumah Kemasan dan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah. Faktor penyebabnya adalah karena tidak terbitnya surat penyediaan dana (SPD) sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Namun demikian, secara umum kinerja penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran selama dua tahun tersebut, yaitu masing-masing sebesar 78,69 persen dan 81,39 persen.

BAB

3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPTK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Arah dan kebijakan makro tahun 2022 masih mengusung tema "**pemulihan ekonomi dan reformasi struktural**".

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DPTK, yakni urusan perindustrian dan urusan ketenagakerjaan, maka dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat pada sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan.

Di dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenperin RI Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah penguatan kewirausahaan dan IKM, peningkatan nilai tambah IKM, pembangunan kerja sama kemitraan dengan industri besar, serta peningkatan proporsi penyaluran perbankan kepada IKM. Sasaran-sasaran strategis tersebut sejalan dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta dengan permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh DPTK Kota Tarakan. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, serta penetapan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPTK Kota Trakan perlu dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI.

> Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Indikator pencapaian sasaran tersebut antara lain: Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan, Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.

Hal ini sejalan pula dengan tujuan strategis serta dapat pula disinergikan dengan program dan kegiatan yang dijalankan DPTK Kota Tarakan guna mendukung upaya dalam mengatasi masalah belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar, masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan/atau pelatihan berbasis kompetensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPTK

Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dengan indikator persentase pertumbuhan unit usaha dan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) yang difasilitasi.
2. Menurunnya pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas DPTK dengan indikator Jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Target Rencana Kerja Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022
1	**Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah yang difasilitasi**		**Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi**	
		Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)	29,57%
			Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	11,11%
		Mengendalikan perizinan usaha industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90%
		Menyediakan data dan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan	40
2	**Meningkatnya kesempatan kerja**		**Persentase tenaga kerja yang terserap**	
		Melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	100%
		Melaksanakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	94%
		Melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	22,35%
		Meningkatkan Penaganan Kasus Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	50%
3	**Meningkatnya Akuntabilitas PD**	Melaksanakan penyediaan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%

3.4. Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan atau subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2019-2024, terdapat tujuh program, 12 kegiatan (●), serta 28 subkegiatan (○) yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2022. Berikut adalah perincian program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
  - *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
  - *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
  - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
  - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
  - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
  - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
  - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - *Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*

3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

- Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
  - *Pelayanan antar Kerja*
  - *Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja*
  - *Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan*
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - *Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*
  - *Job Fair/Bursa Kerja.*

4. Program Hubungan Industrial.

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - *Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan*
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
  - *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
  - *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
  - *Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah*

5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - *Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*
  - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*
  - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
  - *Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*
  - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).*

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
  - *Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).*
  - *Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.*
  - *Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.*

BAB

4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis DPTK Tahun 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menetapkan rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan berikut pendanaannya.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 serta Prakiraan Maju Tahun 2023 adalah sebagaimana diperinci pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Tahun 2022, serta Prakiraan Maju Tahun 2023 DPTK Kota Tarakan

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran,Program(outcome) dan Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju (2023)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah**	Trk	100%	6.626.828.332,00	APBD		100%	6.626.828.332,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	Trk	2 layanan	6.626.828.332,00	APBD		2 layanan	6.626.828.332,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Trk	714 orang bulan	6.541.902.332,00	APBD		714 orang bulan	6.541.902.332,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	Trk	144 0rang bulan	84.926.000,00	APBD		144 0rang bulan	84.926.000,00

Bersambung...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**Trk**	**4 layanan**	**63.447.970,00**	**APBD**		**4 layanan**	**63.447.970,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Trk	5 jenis	4.983.580,00	APBD		5 jenis	4.983.580,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK dan/atau jenis alat dan bahan kebersihan yang tersedia	Trk	35 jenis	29.997.760,00	APBD		35 jenis	29.997.760,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	Trk	6 jenis dan 5941 lembar	8.499.83000	APBD		6 jenis dan 5941 lembar	8.499.830,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	Trk	4 koordinasi	19.966.800,00	APBD		4 koordinasi	19.966.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**Trk**	**100%**	**164.000.000,00**	**APBD**		**100%**	**164.000.000,**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Trk	100 lembar	1.000.000,00	APBD		100 lembar	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	Trk	12 bulan	163.000.000,00	APBD		12 bulan	163.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**Trk**	**21 aset**	**23.593.900,00**	**APBD**		**100%**	**23.593.900,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	Trk	16 unit	5.000.000,00	APBD		16 unit	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Trk	2 unit	8.830.700,00	APBD		2 unit	8.830.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Trk	3 jenis	9.763.200,00	APBD		3 jenis	9.763.200,00

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran,Program(outcome) dan Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju (2023)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase pencari kerja yang kompeten**	Trk	94%		APBD		94%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	Trk	**800 pencari kerja**		APBD		**800 pencari kerja**	
	Proses Pelaksanaan Diklat Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	Trk	1 paket	46.433.130,00	APBD		1 paket	46.433.130,00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyediaan sarpras	Trk	4 unit	100.000.000,00	APBD		4 unit	100.000.000,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Trk**	**22,32%**	**94.997.600,00**	**APBD**		**22,32%**	**94.997.600,00**
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan tersedianya pelayanan antar kerja**	**Trk**	**3 Kegiatan**	**54.998.960,00**	**APBD**		**3 Kegiatan**	**54.998.960,00**
	Pelayanan Antarkerja	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan BKK/BKS	Trk	7 BKK	4.999.960,00	APBD		7 BKK	4.999.960,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	Trk	250 Orang	19.999.840,00	APBD		250 Orang	19.999.840,00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah layanan disabilitasi ketenagakerjaan	Trk	1 kegiatan	29.999.160,00	APBD		1 kegiatan	29.999.160,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah pencari kerja yg terserap/ ditempatkan**	**Trk**	**1200 pencari kerja**	**39.998.640,00**	**APBD**		**1200 pencari kerja**	**39.998.640,00**
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah kegiatan job fair/bursa kerja yang terselenggara	Trk	2 unit	39.998.640,00	APBD		2 unit	39.998.640,00
	Program Hubungan Industrial Persentase kasus HI yang diselesaikan	**Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan**							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja**	Trk	30 perusahaan	19.998.880,00	APBD		30 perusahaan	19.998.880,00

Bersambung...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang menyediakan data dan Informasi SHI, Jamsostek serta persyaratan kerja	Trk	30 perusahaan	19.998.880,00	APBD		30 perusahaan	19.998.880,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama		6 kasus					
	Pencegahan Perselisihan HI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di satu Daerah	Jumlah kegiatan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	Trk	6 kegiatan	64.634.720,00	APBD		6 kegiatan	64.634.720,00
	Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di satu Daerah	Jumlah perjanjian bersama yang disepakati	Trk	2 PB	1.800.000,00	APBD		2 PB	1.800.000,00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan	Trk	6 kegiatan	51.142.500,00	APBD		6 kegiatan	51.142.500,00
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi**	Trk	11,11%		APBD			
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pembangunan industri**	Trk		139.978.150,00	APBD			139.978.150,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Industri Kota Tarakan	Trk	1 dokumen	19.979.980,00	APBD		1 dokumen	19.979.980,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri	Trk	5 kegiatan	69.999.110,00	APBD		5 kegiatan	69.999.110,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	Trk	24 IKM	49.999.060,00	APBD		24 IKM	49.999.060,00

Bersambung...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan**	Trk			APBD			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah data dan informasi industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan**	Trk			APBD			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data dan informasi industri yang dikumpulkan diolah dan dianalisis	Trk	5 dokumen	1.980.000,00	APBD		5 dokumen	1.980.000,00
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah informasi industri yang terpublikasi	Trk	1 buku	19.555.920	APBD		1 buku	19.555.920
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IUI yang menyampaikan data ke SIINas	Trk	1 kali	1.822.000,00	APBD		1 kali	1.822.000,00

BAB

5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2022, merupakan perencanaan untuk satu tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memedomani Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPTK Tahun 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022. Dokumen Renja ini diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2022 dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Guna menjaga kesinambungan perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit, dan seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Rencana Kerja DPTK Tahun 2022 ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan perencaaan dan pencapaian tujuan dan target kinerja yang diamanatkan melalui Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, yakni menurunnya pengangguran, meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dan meningkatnya akuntabilitas DPTK.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai tindak lanjut dari perencanaan dan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DPTK untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, baik melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lain guna menunjang peningatan kinerja pegawai.
2. Pegawai di DPTK dirasakan masih kurang. Oleh sebab itu, dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh pegawai guna peningkatan kinerja pegawai.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan keterlebitan dan peran serta masyarakat mulai dari proses penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi sehingga trasnsparansi akan meningkat.